

Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* PT. Freeport Indonesia oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro

Don Louis Serbiano Kenneno da Costa

Universitas Airlangga

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMMAK) sebagai penghubung antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat dalam rangka menyediakan kebutuhan publik di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penyediaan kebutuhan publik ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dipenuhi oleh PT. Freeport Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kehadiran PT. Freeport Indonesia yang bergerak untuk mengeksplorasi tambang di Kabupaten Mimika dan kemudian ditinjau dengan penyebab yang membuat perusahaan perlu agar memberikan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat sebagai bentuk perbaikan atas dampak perusahaan terhadap masyarakat. Peneliti kemudian menemukan hal baru atas fenomena tersebut yang dapat menggambarkan YPMMAK sebagai badan sosial yang bertujuan untuk menjaga dan menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Freeport Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Berkembangnya Globalisasi yang membawa perusahaan-perusahaan masuk ke negara lain untuk mengeksplorasi dan terutama menambang beberapa sumber daya alam suatu negara telah menjadi fenomena yang menggejala dan berdampak pada stabilitas alam dan sosial. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan fenomena tersebut dengan perspektif teori Antonio Gramsci tentang Gerakan Sosial Intelektual.

Kata Kunci: *Perusahaan Transnasional, Gerakan Sosial Intelektual, Intelektual Organik, YPMMAK, Corporate Social Responsibility .*

Abstract

This article aims to describe the role of Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMMAK) as a liaison between PT Freeport Indonesia and the community in order to provide public needs in Mimika Regency, Central Papua. The provision of public needs is a corporate social responsibility that must be fulfilled by PT Freeport Indonesia. This is motivated by the presence of PT Freeport Indonesia, which is engaged in exploring mines in Mimika Regency and then reviewed with the causes that make it necessary for the company to provide social responsibility to the community as a form of improvement for the company's impact on the community. Researchers then found new things about this phenomenon that can describe YPMMAK as a social agency that aims to maintain and channel PT Freeport Indonesia's corporate social responsibility in carrying out corporate social responsibility. The development of Globalization that brings companies into other countries to explore and especially mine some of the natural resources of a country has become a symptomatic phenomenon and has an impact on natural and social stability. Therefore, this article will describe the phenomenon from the perspective of Antonio Gramsci's theory of Intellectual Social Movements.

Keywords: *Transnational Corporations, Intellectual Social Movements, Organic Intellectuals, YPMMAK, Corporate Social Responsibility.*

Pendahuluan

Kajian Hubungan Internasional secara umum mulanya berangkat dari ide-ide tradisional Hubungan Internasional yang ada di dalam Realisme, Liberalisme dan Konstruktivisme. Kajian ini telah menjadi kajian yang memiliki konsentrasi terhadap isu-isu yang dihasilkan oleh aktor negara saja. Meskipun demikian, dengan berkembangnya masa yang ditandai dengan berakhirnya perang dingin dan juga proses dari globalisasi yang terus berkembang, kemudian turut menghadirkan aktor-aktor lain yang berdinamika pada konstelasi global, yakni aktor-aktor non-negara seperti *Non Governmental Organisations* (NGOs) atau Organisasi Non-Pemerintah serta korporasi baik di dalam skala nasional maupun multinasional dan transnasional. Tidak hanya kemunculan dari aktor-aktor baru saja, tetapi muncul beragam isu yang menjadi konsentrasi di dalam kajian Hubungan Internasional. Isu-isu tersebut meliputi isu terhadap aspek lingkungan, ekonomi, sosial serta isu keamanan yang memiliki sumber ancaman yang tidak hanya diakibatkan oleh eksistensi aktor negara saja.

Perkembangan globalisasi menghadirkan sebuah komponen baru dalam sistem tata kelola global. Secara umum memiliki fungsi untuk berkontribusi dalam melakukan konstruksi yang lebih terkembang dan didasari atas nilai-nilai yang lahir sebagai masyarakat global yang tidak terikat dengan pemerintah dan negara tetapi dapat menjalin hubungan dengan aktor-aktor tersebut. Dalam hal ini komponen tersebut yaitu *Global Civil Society* yang memiliki kualifikasi unik dalam memantau pengaruh atau dampak besar sektor swasta terhadap kehidupan publik. Tantangan ini diambil pada saat yang genting, diantaranya: (1) Kemiskinan global dan kesenjangan kekayaan meningkat; (2) Pekerja anak tetap meluas, dan; (3) Semakin banyak pekerjaan yang dilakukan di *sweatshop*. Dalam konteks ini, kebijakan dan tindakan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan, baik atau buruk, melalui praktik bisnis mereka dan pengaruh mereka terhadap pemerintah dan organisasi multilateral (Oliviero & Simmons 2003). Korporasi yang perlu menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kerap hadir atas sokongan *Civil Social Organisations* (CSO) dan kemudian memiliki beberapa bentuk ekspresi ataupun kampanye seperti label hijau, eko-efisiensi, manajemen siklus hidup, pelaporan lingkungan dan sosial, *triple bottom line*, investasi yang bertanggung jawab secara sosial, dan proses manufaktur tertutup (Oliviero & Simmons 2003). Hal tersebut terjadi karena perusahaan-perusahaan transnasional pada dasarnya dipandang sebagai pelaku utama dalam ekonomi global. Meskipun kehadiran *Global Civil Society* ataupun CSO telah melakukan pembahasan maupun tuntutan-tuntutan terhadap tanggung jawab perusahaan, hal tersebut belum menjadi fokus bagi banyak penelitian independen.

Dalam kaitannya dengan kehadiran CSO yang berperan dalam memantau ataupun menjadi jembatan antara korporasi, negara, dan masyarakat, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPAK) di Kabupaten Mimika, terlibat sebagai lembaga yang memegang peran tersebut bagi masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Adapun peran yang dikonstruksikan sebagai jembatan tersebut kemudian ditunjukkan dalam upaya pembentukan program guna mengelola CSR dari PT. Freeport Indonesia (PTFI). Dalam perkembangannya sebagai lembaga pengelola CSR, YPAK menjadi sebuah yayasan yang memiliki wewenang dalam mengelola CSR PTFI sebab YPAK sudah dijadikan sebagai mitra pengelola CSR oleh PTFI. Hal ini merupakan bentuk fenomena yang kemudian memiliki keselarasan dari gagasan Antonio Gramsci tentang kehadiran CSO sebagai komunitas yang secara global memiliki ide untuk menjunjung hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi. Pentingnya CSR kemudian ditunjukkan bahwa eksplorasi sumber daya alam mineral dan tambang di kabupaten Mimika Papua Tengah oleh PTFI memiliki dampak bagi lingkungan sehingga memberikan efek dominasi bagi stabilitas kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Oleh sebab itu, CSO seperti YPAK memegang peran yang cukup vital, khususnya dalam hal pertanggungjawaban PTFI.

Merujuk tinjauan pustaka tentang peran YPAK sebagai lembaga pengelola CSR PTFI, penulis berargumen bahwa kehadiran YPAK dapat menjadi intelektual organik sekaligus sebagai jembatan antara PTFI dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan upaya pemenuhan CSR tersebut. CSR yang telah dikeluarkan oleh PTFI masih menjadi peran yang belum cukup optimal sebab dari segi pengeluaran dan pendapatan yang telah penulis tinjau dan didukung oleh sejumlah hasil penelitian lainnya sebagai rujukan, terdapat ketidakseimbangan yang terjadi (Naiborhu 2018). Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini penulis menyajikan kajian teori Gerakan Sosial Intelektual oleh Antonio Gramsci (1999) sebagai sudut pandang untuk meninjau pencapaian penyebaran kesejahteraan yang telah diupayakan YPAK sebagai intelektual organik melalui program CSR PTFI, yang mana PTFI sebagai perusahaan transnasional yang telah melakukan aktivitas penambangan emas dan tembaga di Kabupaten Mimika.

YPAK merupakan yayasan yang didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat adat etnis Amungme, Kamoro serta suku kerabat lainnya yakni Dani, Damal, Moni, Mee dan Nduga di Kabupaten Mimika dan sekitarnya. Lembaga pemberdayaan ini secara resmi menjadi lembaga yang menggantikan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LMPAK)

dalam berperan sebagai lembaga pengelola dana Kemitraan PTFI sejak tahun 2019. Adapun pembentukan lembaga YPMAK ini juga secara resmi terbentuk berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0018883.AH.01.04. Tahun 2019 dengan daftar Yayasan Nomor AHU-0025286.AH.01.12. Tahun 2019 yang kemudian dimuat kedalam akte Nomor 12 tanggal 16 Desember 2019 (Ramadhianto 2019). Lembaga ini secara resmi didirikan untuk berperan sebagai lembaga pengelola dana kemitraan PTFI sekaligus menjadi jembatan antara perusahaan tersebut dengan masyarakat dalam kaitannya dengan mekanisme penerapan CSR. Tujuan terbentuknya YMPAK juga didasari oleh visi untuk mendukung pelestarian, pengembangandan pemberdayaan berkelanjutan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan bagi masyarakat lokal di Papua terutama bagi masyarakat etnis Amungme dan Kamoro yang merupakan suku asli didaerah PTFI mendirikan kegiatan bisnisnya. LPMK juga turut berkontribusi untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, mampu bersaing dalam perekonomian dan pasar modern, melestarikan sumber daya alam, budaya dan warisan masyarakat Papua sesuai dengan kearifan lokal untuk mengembangkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam Perkembangannya Sebagai Perusahaan Transnasional di Indonesia

PTFI adalah perusahaan transnasional yang berafiliasi dengan Freeport-McMoran (FCX) dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) yang beroperasi pada sektor tambang mineral di dataran tinggi di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sejak tahun 1992 yang ditandai dengan kontrak antara Indonesia dengan PTFI (Soares 2004). Perusahaan ini beroperasi untuk menjalankan aktivitas penambangan dan kemudian memproses bijih sehingga menghasilkan konsentrat dengan kandungan tembaga, emas dan perak. Konsentrat tersebut lalu dipasarkan secara global khususnya kepada PT. Smelting sebagai smelter tembaga di Indonesia (Naiborhu 2018). Hasil tambang yang terdapat dikawasan mineral Grasberg, Papua merupakan sebuah tambang yang terbesar di dunia dan PTFI mengerjakan proyek pada kawasan tersebut dengan mengembangkan sejumlah sistem tambang bawah tanah. Sejak kontrak diresmikan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan tersebut, keuntungan yang dihasilkan bagi negara terkait dengan pajak mencapai hingga lebih dari 15 miliar dolar AS. Perekrutan tenaga kerja yang dilakukan dalam jumlah besar oleh salah satu pembayar pajak terbesar bagi Republik Indonesia ini kemudian menjadikan kontrak yang

telah dibuat antara Republik Indonesia dan PTFI Indonesia dapat menunjang pembangunan (Renaam *et al.* 2003).

Sebagai perusahaan transnasional, PTFI hadir sebagai perusahaan tambang yang berafiliasi dengan Freeport McMoran (FCX) yang merupakan perusahaan tambang internasional yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Kawasan Grasberg, Papua yang menjadi proyek yang dikelola oleh PTFI adalah salah satu bagian dari portofolio Freeport McMoran (FCX) (Soares 2004). Afiliasi PTFI yang kedua ialah MIND ID yang merupakan *holding industry* Pertambangan Indonesia atau kelompok perusahaan yang diliputi oleh PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero). Kehadiran afiliasi pada grup ini menjadikan PTFI sebagai salah satu anggota kelompok *holding industry* Pertambangan MIND ID tersebut. PTFI dalam perkembangan pertambangan di Papua kemudian menjalankan operasi yang didasari oleh *International Council on Mining and Metals's (ICMM) Sustainable Development Framework* yang diliputi oleh 10 prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus diimplementasikan dalam semua operasi (Renaam *et al.* 2003). Prinsip-prinsip tersebut adalah *Ethical Business, Decision-Making, Human Rights, Risk Management, Health and Safety, Environmental Performance, Conservation of Biodiversity, Reponsible Production, Social Performance, dan Stake Holder Engagement*. Prinsip yang berikutnya prinsip untuk melaporkan kinerja yang sudah dijalankan berdasarkan 10 prinsip sesuai dengan pedoman yang ada pada *Global Reporting Initiative (GRI)* mengenai pengungkapan akan standar manajemen resiko G3 dan *Mining and Metals Sector Supplement (MMSS)*. Kemudian prinsip terakhir ialah komitmen untuk menjamin pemenuhan 10 prinsip ICMM (PTFI 2022).

Kehadiran perusahaan tambang ini tentu harus memiliki ketentuan khusus. Dalam kaitannya dengan perkembangan perusahaan tersebut, CSR untuk menciptakan sebuah dinamika bisnis yang stabil dan berkelanjutan kemudian menjadi nilai yang perlu diwujudkan oleh PTFI sebagai bagian dari masyarakat korporasi di Indonesia (Naiborhu 2018; Oliviero & Simmons 2003). Adapun nilai CSR dari PTFI ini juga didasari oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 tentang CSR perusahaan tambang tersebut perlu diimplementasikan dengan tujuan untuk menjaga relasi dengan baik dengan karyawan, masyarakat lokal maupun pemerintah. Bentuk pertanggung jawaban sosial tersebut kemudian perlu dilakukan dengan dasar bahwa PTFI memiliki kewajiban untuk menyelaraskan kegiatan bisnisnya dengan situasi disekitar yang juga mencakup nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat. Upaya pertanggungjawaban tersebut kemudian menjadi salah satu bentuk interaksi antara ketiga pihak baik antar perusahaan, masyarakat dan

pemerintah yang kemudian menghasilkan bentuk ketentuan tertentu yang berangkat dari ketentuan pemerintah. Komitmen PTFI untuk membangun prospek bisnisnya dengan mengedepankan nilai-nilai CSR kemudian menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai hubungan timbal balik dan juga sebagai implementasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati (Oliviero & Simmons 2003).

Teori Gerakan Sosial Intelektual

Gerakan Sosial Intelektual yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kaum ataupun kelompok intelektual organik bukan hanya dari pihak-pihak yang muncul dari kelas dominan yang memiliki pengaruh dan latar belakang intelektual yang diliputi oleh filsuf, ahli sosial, ahli sastra seniman maupun jurnalis. Dalam hal ini, Gramsci menjelaskan bahwa semua manusia adalah bagian dari intelektual. Hal tersebut tentu menjadi ide yang bertolak belakang dengan pandangan umum ataupun tradisional bahwa mulanya kaum intelektual adalah masyarakat yang memiliki keahlian khusus pada bidangnya. Kehadiran intelektual yang ada di masyarakat lebih dipandang oleh Gramsci bahwa kelompok-kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat juga merupakan bagian dari kelompok tersebut. Keberadaannya lebih cenderung meninjau proses mereka dalam mengembangkan fungsi mereka terhadap masyarakat dengan karakter dasarnya yang independen dan tidak terikat dengan lembaga ataupun pemerintah manapun namun dapat memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan pihak lain (Gramsci 1999).

Intelektual organik merupakan pihak di dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci sebagai penggerak yang mampu membawa sebuah perubahan didalam sistem masyarakat khususnya dengan kaitannya dengan perkembangan perekonomian. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang hadir dalam bentuk yang tidak memiliki strata ataupun kelas. Namun di dalam kelas sosial yang ada di masyarakat, kaum-kaum intelektual itu ada di setiap kelas sosial yang terbentuk di dalamnya. Kehadiran kelompok intelektual yang hadir dalam bentuk lembaga maupun yayasan sosial yang diisi oleh intelektual tidak dipandang melalui kapasitasnya sebagai kumpulan para ahli yang terorganisir didalam suatu atau lebih kelompok, melainkan cenderung lebih ditinjau pada fungsinya di dalam organisasi ataupun lembaga sosial itu sendiri. Pada mulanya dalam pandangan yang tradisional, Gramsci menjelaskan bahwa kehadiran intelektual yang terkumpul dan membentuk sebuah organisasi itu muncul dari kelas dominan yang ada di dalam masyarakat. Namun kelompok yang juga telah menjadi aktor

untuk menerapkan perannya terhadap masyarakat itu muncul dengan tampilan yang sifatnya lebih independen dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Sifat yang cenderung untuk menjadi organisasi masyarakat yang independen ini memiliki tujuan agar dapat memiliki peran dalam memperbaiki tatanan yang telah terdampak dari kehadiran hegemoni kelas dominan yang menjadi pusat kekuatan dimasyarakat yang terdominasi oleh kehadiran pihak atau aktor dominan tersebut. Oleh sebab itu intelektual organik yang muncul dalam bentuk organisasi masyarakat ini mengembangkan tujuan tersebut dengan mengemban tugas ataupun peranan khusus untuk mengatasi dampak yang diberikan oleh aktor dominan (Gramsci 1999).

Dalam pemahaman yang lebih luas, intelektual organik adalah kelompok yang muncul dan memiliki tujuan untuk menjadi organisator bagi masyarakat sehingga hal tersebut berkaitan erat dengan keterlibatannya dalam pelayanan masyarakat. Secara khusus, intelektual di klasifikasikan dalam dua jenis, yakni intelektual tradisional dan intelektual yang lahir dari kelas masyarakat tertentu. Intelektual tradisional merupakan kelompok yang tampak terpisah dari kelasnya namun intelektual inilah yang hadir sebagai intelektual organik. Jenis yang kedua adalah kelompok Intelektual yang muncul dari kelas tertentu, mereka memiliki peran untuk menjadi perancang dan pengorganisir terhadap sejumlah kelas tertentu (Gramsci 1999). Kelompok intelektual organik bagi masyarakat sipil merupakan kelompok ataupun organisasi sosial yang hadir sebagai penggerak sekaligus wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan kesejahteraan. Dalam hal ini, keterlibatan YPMAK sebagai lembaga masyarakat yang berperan sebagai jembatan antara PTFI dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat kemudian menjadi teori yang memiliki relevansi dalam meninjau peran tersebut. Interaksi yang dilakukan antara YPMAK bersama masyarakat untuk menerapkan tata kelola CSR PTFI sebagai perusahaan tambang terbesar di Indonesia kemudian penulis tinjau lebih lanjut dengan Gerakan Sosial Intelektual yang dijalankan YPMAK sebagai kelompok Intelektual Organik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat lewat tanggung jawab yang diterapkan PTFI terhadap pembangunan daerah.

Metode Penelitian

Studi ini disajikan dengan hasil pendekatan metode menggunakan metode deskriptif guna menjelaskan kehadiran YPMAK yang menjadi jembatan bagi PTFI untuk memberikan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat sebagaimana dengan yang sudah tertera didalam komitmen PTFI sebagai perusahaan tambang transnasional berdiri di Indonesia sejak tahun 1967. Selain itu, dalam mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu model penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Sutinah 2007), dengan menarasikan informasi dan analisa terkait dengan tujuan untuk menyajikan hasil temuan berdasarkan tinjauan dari pandang tertentu yakni Teori Gerakan Sosial Intelektual Antonio Gramsci. Adapun metode pengumpulan data yang hasilnya akan disajikan didalam pembahasan ini ialah studi pustaka dengan meninjau informasi-informasi yang telah ditemukan pada sejumlah penelitian dan laporan yang berkaitan dengan topik pembahasan ini.

Peran YPMAK sebagai lembaga pengelola CSR yang diterapkan PTFI Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika

Kehadiran YPMAK merupakan sebuah bentuk gerakan yang penulis pahami sebagai gerakan yang muncul dari masyarakat dimana dalam kaitannya dengan kesejahteraan. YPMAK kemudian memiliki peran untuk menerapkan tugas sebagai lembaga sosial yang mengelola tanggung jawab sosial yang diberikan oleh PFTI kepada masyarakat di Kabupaten Mimika dan Kota Timika. CSR yang diterapkan oleh PTFI adalah bentuk interaksi yang perlu diimplementasikan oleh upaya pengembangan, reklamasi, dukungan pembangunan, dan penjaminan. YPMAK yang ditinjau dari pandangan Gramsci sebagai intelektual organik dalam masyarakat memiliki peran sebagai jembatan antara masyarakat dengan PTFI. Hal tersebut hadir dengan bentuk penerapan sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dengan menjalin kerjasama dengan YPMAK. Adapun dalam hal ini, PTFI merupakan penyumbang dana untuk mendukung program yang sudah terlaksana sejak awal. Tanggung jawab sosial yang dikelola oleh PTFI dengan YPMAK sebagai lembaga yang menjadi jembatan dalam proses penerapannya adalah program untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat lokal melalui dana kemitraan PTFI. Dana kemitraan tersebut merupakan bagian terbesar dari investasi sosial PTFI yang disalurkan melalui YPMAK (PTFI 2022).

CSR yang dilakukan oleh PTFI baik bagi daerah tempat didirikannya perusahaan tersebut maupun bagi Indonesia program pemberdayaan masyarakat yang sudah diterapkan sejak tahun 2008 (PTFI 2022). Program pemberdayaan yang dilakukan dibawah manajemen YPMAK dan Koperasi Aitomoa ini kemudian memiliki tujuan untuk melibatkan peran wanita sebagai bentuk dukungan dan penjunjungan emansipasi wanita juga sudah menjadi bagian dari program ini. Program pemberdayaan tersebut mencakup pemberian keterampilan dengan mengadakan pelatihan untuk mewujudkan manajemen keuangan rumah tangga, keterampilan menjahit, dan pengembangan industri-industri rumahan dengan menerapkan kerjasama dengan Koperasi Aitomoa sebagai

koperasi yang memiliki tujuan untuk menerapkan upaya-upaya peningkatan kapasitas wanita diberbagai sektor kehidupan. Dalam hal ini pandangan penulis kemudian menyatakan bahwa YPMAK yang berperan sebagai jembatan kesejahteraan bagi masyarakat melalui dana CSR PTFI kemudian juga hadir sebagai lembaga yang memberi dukungan penuh terhadap nilai masyarakat terkait dengan emansipasi wanita. Pemberdayaan wanita yang telah menjadi program utama Koperasi Aitomoa yang ditambah dengan dukunga YPMAK kemudian menjadikan pandangan Gramsci menjadi sejalan dengan fenomena tersebut dimana adanya tujuan untuk menyebarkan perubahan dan inovasi baru pada masyarakat melalui interaksi yang dilakukan oleh YPMAK sebagai intelektual organik yang menjalankan Gerakan Sosial Intelektual kepada masyarakat.

PTFI juga menerapkan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang mencakup pengembangan kapasitas bagi pelajar dan tenaga pendidik. PTFI dan YPMAK telah memberikan 11.000 beasiswa yang berlangsung sejak 1996 hingga 2018 (PTFI 2022). Beasiswa tersebut diberikan kepada masyarakat mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat doktoral, dan secara rutin melakukan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah tempat para penerima beasiswa belajar. Sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa di daerah terpencil, PTFI dan YPMAK lalu membangun kerjasama dengan Yayasan Pesat dan Keuskupan Timika untuk membangun sekaligus mengoperasikan 5 asrama untuk anak laki-laki dan perempuan di Mimika, dan dengan Yayasan Binterbusih di Jawa Tengah. Penerapan pola pendidikan asrama ini bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan di antara para siswa, menuju kemandirian dan keteraturan dalam pola hidup mereka. Adapun dalam kaitannya dengan pendidikan untuk kalangan pendidik, kerjasama dengan pihak ketiga juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi guru-guru di Kabupaten Mimika dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam mengajar mata pelajaran tertentu, serta membantu guru-guru yang ditugaskan di daerah pedalaman (PTFI 2022). Meninjau dari pelaksanaan program-program CSR yang dikelola oleh YPMAK tersebut, penulis menganalisa bahwa peranan kelompok intelektual ini kemudian mampu menyokong rakyat dalam hal pembangunan kapasistas. Adapun peran tersebut memiliki nilai yang erat dengan ide Gramsci bahwa adanya kesadaran menjunjung hak-hak sipil agar dicapai. Oleh sebab itu, YPMAK kemudian berupaya mengambil peran sebagai jembatan penyebar kesejahteraan bagi masyarakat dengan menerapkan tata kelola CSR PTFI kepada masyarakat. Peningkatan kualitas daya yang termuat didalam program CSR dibidang pendidikan dan kesehatan kemudian menjadi bentuk interaksi antara kaum intelektual yang independen untuk memberikan kecerdasan bagi kehidupan bangsa.

PTFI juga membangun Institut Pertambangan untuk melatih masyarakat lokal dalam hal keterampilan yang dibutuhkan untuk pertambangan kelas dunia dan mempersiapkan mereka untuk bersaing dalam tenaga kerja industri pertambangan. Adapun komitmen lainnya sebagai bentuk CSR yang diterapkan oleh PTFI terhadap lingkungan adalah dengan mengimplementasikan program Reklamasi dan Re-Vegetasi (PTFI 2022). Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh aktivitas pengerukan dan penggalian yang telah dilakukan dari hasil eksplorasi PTFI baik di Kabupaten Mimika maupun pusat penambangan milik PTFI sendiri yang terletak di Grasberg, Papua. Penerapan tersebut dilakukan untuk memperbaiki kembali titik-titik lahan bekas penambangan. Dalam hal ini PTFI telah mengimplementasikan reklamasi dan revegetasi sebagai pertanggungjawabannya terhadap lingkungan dengan reboisasi lahan sebesar 378 hektar yang berhasil dilakukan pada tahun 2018 (PTFI 2022). Pada program ini kehadiran YPMAK sebagai lembaga pengelola CSR kemudian menjadi sebuah program yang hanya bisa ditangani oleh perusahaan itu saja. Meskipun dalam hal ini penulis dapat memahami juga bahwa kedekatan YPMAK dengan masyarakat kemudian dapat mengakomodir tujuan PTFI untuk memperbaiki kembali lingkungan yang telah terdampak. Hal ini juga dapat menjadikan PTFI dapat membangun relasi dengan masyarakat melalui program tersebut.

Pada bidang kesehatan masyarakat, bentuk pertanggungjawaban PTFI di kabupaten Mimika untuk kawasan dataran rendah dan dataran tinggi adalah penyediaan fasilitas kesehatan berupa klinik dan rumah sakit. Pada tahun 1999, PTFI membangun Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dengan mendistribusikan dana kemitraan PTFI kepada Yayasan Caritas Timika Papua yang merupakan Yayasan pengelola untuk rumah sakit tersebut untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Mimika wilayah dataran rendah. RSMM yang didirikan oleh hasil kerjasama PTFI dengan Yayasan Caritas Timika tersebut memiliki 4 jenis spesialisasi pelayanan yang yaitu, bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan anak. PTFI juga membangun Rumah sakit lainnya yang terletak di kawasan Dataran tinggi Kabupaten Mimika yakni, Rumah Sakit Waa Banti (PTFI 2022). Rumah sakit tersebut adalah rumah sakit tipe D yang dioperasikan sejak tahun 2001 dengan bekerjasama dengan Internasional SOS sebagai badan pengelola rumah sakit tersebut. PTFI dengan kerjasamanya YPMAK juga mendukung sejumlah klinik di Kabupaten Mimika sebagai bentuk CSR terhadap masyarakat berupa pemberian sponsor bagi sejumlah klinik-klinik di Kampung Wangirja, Kampung Utikini, Nayaro dan Pomako (PTFI 2022).

Merujuk pada konsep CSR dari Melanie Ruth Oliviero dan Adele Simmons, upaya PTFI dalam merealisasikan bentuk pertanggung jawaban atas eksistensi dan dinamika bisnis yang dijalankan di Kabupaten Mimika kemudian menjadi sebuah bentuk yang memiliki kontribusi yang cukup berpotensi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi mikro, pendidikan dan kesehatan. Bentuk pengupayaan YPMAK untuk mengelola CSR PTFI dengan mendirikan dan mengorganisir pendirian akses-akses kesehatan disejumlah area di sekitar Kabupaten Mimika dan Kota Timika kemudian sejalan dengan asumsi Gramsci didalam Teori Gerakan Sosial Intelektual yang menjelaskan bahwa Intelektual Organik hadir sebagai pengorganisir massa yang dimana dalam hal ini YPMAK dengan posisinya yang memiliki sejumlah lembaga mitra kemudian menjadikan akses-akses kesehatan tersebut tersebar dengan bantuan lembaga-lembaga mitra tersebut. Pertanggungjawabannya terhadap pelestarian lingkungan sebesar 378 hektar disekitar area Grasberg dan Tembagapura kemudian menjadi upaya untuk memenuhi tugas sebagai perusahaan yang turut bertanggung jawab untuk memenuhi aspek pembangunan berkelanjutan dan juga merujuk akan pemahaman terhadap tanah adat sebagai hak ulayat masyarakat Amungme dan Kamoro di Mimika (PTFI 2022).

Meskipun kehadiran YPMAK dengan perannya sebagai jembatan bagi masyarakat dengan PTFI dapat dipandang sebagai intelektual organik yang bergerak untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan mendobrak dominasi PTFI dalam hal ekspolasi tambang secara besar-besaran di Kabupaten Mimika, hal tersebut belum sepenuhnya menjadikan interaksi yang dilakukan YPMAK sebagai jembatan interaksi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan dapat terjamin dengan baik. Berdasarkan tinjauan penulis yang merujuk pada perjanjian Kontrak Karya yang pertama hingga yang keempat antara PTFI dengan pemerintah Negara Republik Indonesia sejak tahun 1967, kontrak karya yang sudah ditetapkan itu hanya diliputi oleh kontrak yang memberikan mekanisme bahwa Indonesia di dalam kontrak karya yang pertama tidak menerima kompensasi apapun. Kontrak tersebut kemudian hanya hadir sebagai bentuk perizinan bagi PTFI untuk mendulang emas dan mengirimkan peralatannya ke Kabupaten Mimika pada 1967. Meskipun komitmen ICMM hadir sebagai dasar bergeraknya bisnis sekaligus pedoman bagi PTFI, tetapi dalam kontrak karya pertama yang menjadikan PTFI untuk dapat menjalankan aktivitasnya di Provinsi Papua pada saat itu selama 30 tahun dipandang sebagai kesepakatan yang perlu ditinjau kembali dalam hal penerapan CSR. Hal ini karena bahkan dari sisi negara sendiri, tidak ada kompensasi yang masuk agar diterima. Dalam pembaruan kontrak karya II dan III, penerapan pemberlakuan pajak ekspor bagi

perusahaan menjadikan Indonesia menerima pemasukan pajak dari masing-masing perusahaan termasuk PTFI menjadi 0,025 hingga 0,7 dollar AS per meter kubik ton dari pengasilan tambang yang diperoleh sehingga penghasilan yang diperoleh dari penghasilan utama PTFI menjadi 35 persen. Tahun 1988 juga menjadi momentum lain di mana kemudian penemuan tambang Erstberg yang menjadi tanah terbesar pertama bagi PTFI (Ramadhianto 2019).

Hal tersebut berlanjut pada proses pembaharuan kontrak karya ke-IV dimana dengan kehadiran 75 juta ton emas dan tembaga yang dapat diperoleh dari Erstberg kemudian menjadikan kontrak tersebut berlangsung bagi PTFI selama 30 tahun hingga 2041. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi asumsi penulis bahwa meskipun kehadiran YPMAK dapat menjembatani PTFI dengan masyarakat, tetapi dalam kaitannya dengan pendapatan yang diterima negara sekaligus dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan tersebut kemudian menjadi fenomena yang menunjukkan bahwa setelah berakhirnya masa kerja PTFI pada 2041 (Raharja *et al.* 2018). Indonesia dan masyarakatnya kemudian dapat mengalami sebuah dampak lingkungan yang ditinggalkan oleh perusahaan tersebut terkait dengan limbah. Pertanggungjawaban sosial PTFI yang dikelola oleh YPMAK dalam hal ini kemudian masih berada pada taraf dimana perlu adanya pengembangan terhadap program-program tersebut. Disisi lain, meskipun PTFI juga telah melaksanakan program reklamasi dan revegetasi di kawasan bekas tambang yang ada di Erstberg, namun hal tersebut masih berdampak terhadap masyarakat terutama pada kesejahteraan tempat tinggal.

Adapun dalam sejumlah program CSR yang telah diterapkan PTFI, nilai hak asasi manusia dan kesetaraan telah diupayakan agar diimplementasikan dengan baik berdasarkan pengelolaan yang dilakukan oleh YPMAK sebagai intelektual organik. Penulis kemudian meninjau dan menganalisis bahwa upaya tersebut tidak sepenuhnya menjadi bentuk yang setimpal dengan dampak perusahaan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Dalam kaitannya dengan dana CSR yang dikelola oleh YPMAK dan PTFI juga menjadi hal yang mendasari pendapat penulis terhadap pembahasan ini bahwa peran YPMAK sebagai jembatan untuk mensejahterakan masyarakat melalui CSR PTFI kemudian belum sepenuhnya tercapai. Apabila ditinjau dari jumlah pendanaan yang diberikan penulis menemukan bahwa 300 juta rupiah yang menjadi dana untuk CSR dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat kemudian tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh PTFI sebanyak 4,2 miliar dolar AS yang dimana sejak tahun 2005 royalti beserta pajak perusahaan yang diterima oleh Indonesia hanya sebanyak 9,4 persen saja (Pratiwi 2009). Peran YPMAK sebagai Intelektual Organik meskipun sejara ideologi menurut Gramsci

sudah sejalan namun dalam pemenuhannya secara konkrit belum cukup optimal. Pengelolaan yang dasarnya telah menjadi Visi dari YPMAK sebagai mitra pengelola CSR PTFI masih perlu mendapatkan penunjauan dan pengembangan lanjutan baik dari segi kualitas sumber daya manusia maupun segi teknis dalam mekanisme penjabatan program CSR. Penulis meninjau bahwa potensi untuk lebih menjunjung pemenuhan CSR PTFI kepada masyarakat Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika dapat disokong dengan lebih baik kedepannya sebab kedekatan YPMAK dengan masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro.

Kesimpulan

Implementasi CSR PTFI melalui kehadiran YPMAK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola CSR tersebut agar disalurkan kepada masyarakat telah menjadi kewajiban yang mendasar bagi PTFI. Berangkat dari awal berdirinya ditandai dengan Kontrak Karya I pada tahun 1967 hingga dewasa ini, program CSR yang diterapkan oleh PTFI memiliki tujuan meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan. Hal ini telah menjadi program yang bersifat wajib sebagai perusahaan transnasional. Apabila ditinjau dari pedoman ICMM yang menjadi dasar pendirian PTFI sebagai perusahaan tambang di Indonesia, PTFI perlu agar menjaga stabilitas lingkungan serta sosial yang ada dimasyarakat. Ditinjau dari 10 kriteria ICMM yang menyangkut tentang pengolahan limbah, pembangunan dan pengembangan relasi baik antar perusahaan maupun dengan masyarakat serta adanya penyebaran kesejahteraan serta pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk dari kompensasi atas dampak yang sudah dihasilkan perusahaan. Pemenuhan pertanggung jawaban oleh PTFI kemudian dilakukan dengan tujuan untuk membangun interaksi antara masyarakat pemerintah serta yayasan lokal. Sehingga hal tersebut hadir sebagai hubungan timbal balik yang harus dilakukan sebab pemanfaatan dan eksplorasi lahan yang dilakukan oleh PTFI memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

Ketidakseimbangan yang muncul diantara pemasukan negara dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan tersebut kemudian menjadikan program CSR yang diterapkan juga tidak menjadi sebuah bentuk penyebar kesejahteraan yang optimal. Kehadiran YPMAK yang berperan sebagai jembatan antara PTFI dengan masyarakat kemudian masih menjadi bentuk penyebaran kesejahteraan yang kurang optimal ditinjau dari program dan pendanaan yang kurang dari 0,01 persen dari pendapatan yang diperoleh yakni 300 juta rupiah setiap bulan bagi pelajar dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh PTFI sejak tahun

2005 hingga dewasa ini yang berjumlah 4,2 miliar Dolar AS yang disertai dengan 35 persen yang diterima oleh negara kemudian masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan program CSR PTFI. Meskipun tujuan untuk mencapai kesejahteraan telah diupayakan oleh YPMAK sebagai intelektual organik yang hadir sebagai bagian dari masyarakat untuk mencapai pemenuhan hak-hak masyarakat dari kehadiran PTFI, upaya yang lebih optimal dan pengembangan berkelanjutan menjadi rekomendasi yang dapat penulis ajukan untuk menutup pembahasan ini.

Referensi

Buku dan Sub Bab dalam Buku

Gramsci, A., 1999. *Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.

Sutinah, S. B., 2007. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Artikel Jurnal

Naiborhu, N. S., 2018. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial and Lingkungan pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT. Penanam Modal dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, pp. 63-88.

Oliviero, M. B., & Simmons, A., 2003. “Who’s Minding the Store? Global Civil Society and Corporate Responsibility”, *The State of Global Civil Society in 2003*, pp. 77-107.

Pratiwi, F. D., 2009. “Kontradiksi Bumi Papua: Tinjauan Kritis Program CSR PT. Freeport Indonesia di Papua”, *Jurnal Komunikasi*, 3(2): 115- 206.

Renyaam, B. M., Mantiri, M., & Kasenda, V., 2003. “Efektifitas Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Freeport Indonesia dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua”, *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Politik*, 3(3).

Ramadhianto, Risqi Dwi, 2019. “Analysis of Sustainable Development by ICMM and SO 26000 Towards Alexander Dahlsrud and Geoffrey Lantos Corporate Social Responsibility Dimensions Case Study: PT. Freeport Indonesia”, *Journal of Bussiness and Management*.

Raharja, I Ketut; Widya Nugraha, A.A. Bagus Surya; Prameswari, Anak Agung Ayu Intan, 2020. “Analisis Bargaining Power Indonesia dan PT Freeport Indonesia Dalam Negosiasi Pengalihan Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Tahun 2017 – 2018”, *Dikshi (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, 1(2).

Soares, A. D., 2004. “The Impact of Corporate Strategy on Community Dynamic: A Case Study of Freeport Mining Company in West Papua, Indonesia”, *International Journal on Minority and Group Rights*, pp. 115-142.

Artikel Online

- PTFI, 2022. "Community Capacity Building: Empowering Communities, Sustaining Mutual", *PT Freeport Indonesia* [Online]. Tersedia dalam <https://ptfi.co.id/en/community-capacity-building> (Diakses pada tanggal 3 Maret 2024)
- PTFI, 2022. "PTFI Sustainability Forging Cooperation, Ensuring Sustainable Development", *PT Freeport Indonesia* [Online]. Tersedia dalam <https://ptfi.co.id/en/ptfi-sustainability> (Diakses pada tanggal 3 Maret 2024)
- PTFI, 2022. "Health Programs", *PT Freeport Indonesia* [Online]. Tersedia dalam <https://ptfi.co.id/en/health-program> (Diakses pada tanggal 3 Maret 2024)
- PTFI, 2022. "Reclamation And Re-vegetation", *PT Freeport Indonesia* [Online]. Tersedia dalam <https://ptfi.co.id/en/reclamation-and-revegetation> (Diakses pada tanggal 3 Maret 2024).